

KERJASAMA INDONESIA-PRANCIS DALAM PENGADAAN ALUTSISTA JET TEMPUR RAFALE TAHUN 2022

Arya Putra Wicaksana¹, Suwarti Sari², Yusep Ginanjar³

1. Program Studi Magister Hubungan Internasional Universitas Jenderal Achmad Yani, Cimahi, Indonesia
2. Program Studi Magister Hubungan Internasional Universitas Jenderal Achmad Yani, Cimahi, Indonesia
2. Program Studi Magister Hubungan Internasional Universitas Jenderal Achmad Yani, Cimahi, Indonesia

ABSTRACT

In 2019, Indonesia began to make progress with the drafting of the Defences Cooperation Agreement (DCA), Indonesia-France as the Minister of Defence Prabowo Subianto was inaugurated with a desire to rejuvenate Indonesia's defence forces and he was active in conducting diplomacy related to defence cooperation with other countries, one of which was France. In an effort to improve Indonesia's defence forces, this research focuses on Indonesia-France cooperation in the procurement of Rafale fighter jets. In this research the author will use the Neo-Realism approach, because Neo-Realism sees the development of increasingly sophisticated military technology causing the threat level to also increase, thus encouraging countries to cooperate. In addition, researchers will also use National Interest, International Cooperation and Foreign Policy. The research method used by researchers is a qualitative approach and analytical descriptive research type. This research produces findings that explain internal and external factors are the reasons for cooperation between Indonesia and France in the procurement of Rafale fighter jets. Internal factors include the state of the domestic defence industry, the personalities of policy makers, such as the President and Minister of Defence, and external factors, such as Indonesia's position at the global level.

Keywords: International Cooperation, Defence Cooperation, Defence Equipment

ABSTRAK

Pada tahun 2019, Indonesia memulai sebuah kemajuan dengan disusunnya *Defences Cooperation Agreement* (DCA), Indonesia-Prancis seraya dengan dilantiknya Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang memiliki keinginan dalam peremajaan kekuatan Alutsista Indonesia dan dirinya aktif dalam melakukan diplomasi terkait kerjasama pertahanan dengan negara lain, salah satunya Prancis. Dalam upaya untuk meningkatkan kekuatan Alutsista Indonesia, penelitian ini berfokus pada kerjasama Indonesia-Prancis dalam pengadaan jet tempur Rafale. Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan pendekatan Neo-Realisme, karena Neo-Realisme melihat perkembangan teknologi militer yang semakin canggih menyebabkan tingkat ancaman juga meningkat, sehingga mendorong negara - negara untuk melakukan kerja sama. Selain itu, peneliti juga akan menggunakan Kepentingan Nasional, Kerjasama Internasional dan Politik Luar Negeri. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan kualitatif dan tipe penelitian deskriptif analitik. Penelitian ini menghasilkan temuan yang menjelaskan terkait faktor internal dan eksternal adalah alasan kerja sama antara Indonesia dan Prancis dalam pengadaan jet tempur Rafale. Faktor internal sendiri termasuk keadaan industri pertahanan dalam negeri, kepribadian para pemangku kebijakan, seperti Presiden dan Menteri Pertahanan, dan faktor eksternal, seperti posisi Indonesia di tingkat global.

Kata Kunci: Kerjasama Internasional, Kerjasama Pertahanan, Alutsista

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki posisi geografis yang strategis dan kekayaan alam yang melimpah, yang membuatnya rentan terhadap berbagai potensi ancaman keamanan. Kondisi ini menuntut peningkatan kemampuan pertahanan nasional, terutama dalam hal Alat Utama Sistem Pertahanan (Alutsista). Di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, salah satu prioritas utama kebijakan pertahanan adalah pengadaan Alutsista yang memadai untuk memperkuat kemampuan militer Indonesia dan menjaga kedaulatan negara (CNN, 2023). Meskipun Indonesia memiliki jumlah personel militer yang besar, dari segi teknologi, negara ini masih tertinggal dibandingkan beberapa negara tetangga, seperti Australia, yang memiliki jet tempur generasi kelima dengan teknologi canggih seperti kemampuan 'siluman'.

Untuk memperbaiki kesenjangan ini, Indonesia berusaha memenuhi Minimum Essential Force (MEF) melalui kerjasama internasional, termasuk dengan Prancis. Salah satu langkah signifikan adalah pembelian jet tempur Rafale, yang diproduksi oleh Dassault, sebagai bagian dari kesepakatan kerjasama pertahanan antara kedua negara. Jet tempur Rafale dipilih karena kemampuan "omnirole"-nya yang dapat menjalankan berbagai misi pertahanan secara efektif, termasuk Quick Reaction Alert (QRA) untuk melindungi kedaulatan udara. Hubungan kerjasama ini didukung oleh perjanjian Defence Cooperation Agreement (DCA) yang disusun pada tahun 2019, yang juga mencakup aspek perlindungan informasi rahasia antara kedua negara (Kemhan RI, 2019).

Kerjasama dengan Prancis ini merupakan bagian dari upaya Indonesia untuk memperbarui dan memperkuat kemampuan Alutsista, sesuai dengan kebutuhan strategis pertahanan nasional. Dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang aktif melakukan diplomasi pertahanan dan memperkuat kerjasama internasional, Indonesia memanfaatkan momentum ini untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas Alutsista. Kesepakatan dengan Prancis ini menunjukkan komitmen Indonesia dalam memperkuat pertahanan nasional melalui modernisasi teknologi dan kerjasama global, sehingga mampu menghadapi berbagai ancaman di era kontemporer (Kemhan RI, 2019).

KERANGKA ANALITIK

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang dianggap sesuai dengan permasalahan yang ada untuk dijadikan sebagai pedoman. Pada bab ini juga akan dibahas mengenai landasan teoritis dan landasan konseptual yang digunakan untuk membahas Kerjasama Indonesia-Prancis dalam Pengadaan Alutsista Jet Tempur Rafale Tahun 2022.

1. Neo-Realisme

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan Neo-Realisme, karena Neo-Realisme dianggap mampu menjawab apa faktor yang mendorong kerjasama Indonesia-Prancis dalam pengadaan Alutsista jet tempur Rafale tahun 2022. Hal ini dikarenakan saat ini perkembangan teknologi militer yang semakin canggih menyebabkan tingkat ancaman juga meningkat, sehingga mendorong negara - negara untuk melakukan kerja sama. Memaksimalisasi power terutama kapabilitas kekuatan militer Indonesia sebagai respon terhadap perkembangan teknologi untuk mengimbangi kekuatan dan untuk meningkatkan keamanan nasional serta menghindari ancaman baik aktual maupun potensial (Hermawan, 2008). Hal tersebut semuanya sesuai dengan asumsi - asumsi neorealis bahwa sistem internasional bersifat anarki, karena tidak ada otoritas sentral untuk memaksakan tata tertib. Lalu, dalam sistem internasional ini, kepentingan utama negara adalah keberlangsungannya negara itu sendiri, sehingga negara akan memaksimalkan power mereka khususnya militer. Sebagai suatu negara yang berada dalam sistem internasional, indonesia mengambil peranan penting dalam upaya BoP dengan memaksimalkan kepentingan negara khususnya dalam bidang militer dan pertahanan dalam upaya struggle for power (Jackson dan Sorensen, 2014).

2. Kepentingan Nasional

Daniel S. Papp (1994) menyatakan bahwa kepentingan nasional dapat bersifat objektif maupun subjektif karena kepentingan tersebut tidak hanya bersifat material namun juga bersifat non – material seperti value, contohnya antara lain yaitu ideologi. Kepentingan nasional merupakan tujuan mendasar dan faktor yang menentukan dalam proses perumusan kebijakan luar negeri suatu negara yang kemudian dipahami sebagai konsep dasar dalam politik luar negeri, konsep tersebut dapat diorientasikan pada ideologi suatu negara. Dengan demikian keputusan dan tindakan politik luar negeri dapat didasarkan pada pertimbangan – pertimbangan ideologis ataupun dapat terjadi atas dasar pertimbangan kepentingan material. Peneliti menggunakan konsep ini untuk menganalisis

upaya yang dilakukan Indonesia untuk mencapai kepentingan nasionalnya, memaksimalkan pencapaian Rencana Pembangunan Kekuatan Pokok (MEF) Alutsista untuk peningkatan postur pertahanan Indonesia dan memfokuskan kekuatan pertahanan untuk upaya preventif dan antisipatif untuk mengatasi ancaman yang bersifat aktual dan potensial. Rencana pembelian jet tempur Su-35 ini termasuk pembangunan MEF, Alutsista ini adalah kepentingan nasional Indonesia untuk berupaya mempertahankan keberlangsungan hidup dan keamanan nasional.

3. Kerjasama Internasional

Konsep ini digunakan untuk menjelaskan perilaku dalam memenuhi kebutuhannya, seringkali dilakukan melalui proses kerjasama karena pada dasarnya setiap negara tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri agar dapat saling memenuhi dan saling menguntungkan antar negara tersebut (K.J. Holsti,

1992). Sama halnya dengan kerjasama Indonesia dengan Prancis saat ini, hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan kapabilitas militer melalui kerjasama pertahanan dan juga digunakan untuk menjalin hubungan baik diluar kawasan sehingga tercipta hubungan yang harmonis.

4. Politik Luar Negeri

Pada dasarnya kebijakan luar negeri adalah “action theory”, atau kebijaksanaan yang dibuat oleh suatu negara yang kemudian ditujukan ke negara lain demi mencapai suatu kepentingan tertentu. Politik luar negeri (foreign policy) merupakan suatu perangkat formula nilai, sikap, arah, serta sasaran untuk mempertahankan dan memajukan kepentingan nasional di dalam percaturan dunia internasional (Supriyanto, 2014). Kebijakan luar negeri dapat dikatakan juga sebagai visi dan misi dimana perencananya didasarkan pada pengetahuan ataupun pengalaman baik dalam tindakan maupun tingkah laku dalam hubungan internasional yang mempunyai tujuan untuk mempromosikan dan melindungi kepentingan suatu negara (Aleksius Jemad, 2008).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan kualitatif dan tipe penelitian deskriptif analitik. Dalam Teknik pengumpulan data, dijelaskan bagaimana cara peneliti mengumpulkan data yang dibutuhkan (Bakry, 2016). Maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua macam teknik pengumpulan data yaitu studi

kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan cara pengumpulan data dari bermacam-macam material yang terdapat di ruang kepustakaan seperti koran, buku-buku, majalah, naskah, dokumen dan sebagainya yang relevan dengan penelitian.¹

PEMBAHASAN

Kerjasama Pertahanan Indonesia-Prancis

Sejak awal masa kolonial Hindia Belanda pada abad ke-19, Indonesia dan Prancis telah menjalin hubungan yang cukup lama, terutama di bidang pertahanan. Sejak 1950, hubungan bilateral antara kedua negara telah terjalin erat, didasarkan pada kesamaan prinsip dalam kebijakan dan politik luar negeri. Meskipun Indonesia menerapkan politik luar negeri bebas aktif, hubungan bilateral ini tetap stabil dan harmonis karena adanya kepentingan bersama yang kuat. Prancis dipandang Indonesia sebagai mitra penting di Eropa Barat, dan sebaliknya, Prancis juga melihat pentingnya kerjasama berkelanjutan dengan Indonesia, yang terlihat dalam kunjungan Presiden Prancis François Mitterrand ke Indonesia pada 1986 untuk memperkuat hubungan bisnis melalui *Indo French Chamber of Commerce and Industry* (IFCCI). (Kemenlu RI, 2024)

Seiring berjalannya waktu, kerjasama yang telah dibangun antara kedua negara menjadi fondasi yang kuat dalam hubungan bilateral mereka, terutama dalam bidang pertahanan. Indonesia bertekad untuk mewujudkan industri pertahanan yang kuat, mandiri, dan berdaya saing, seperti yang digariskan dalam Buku Putih Pertahanan. Namun, untuk mencapai kemandirian penuh, Indonesia menyadari perlunya kerjasama dengan negara-negara maju yang memiliki visi serupa, termasuk Prancis. Kesepakatan penting dalam kerjasama pertahanan ini adalah Memorandum of Understanding (MoU) yang ditandatangani pada Juli 1996 dan diperbarui setiap lima tahun, yang mencakup bidang industri pertahanan, logistik, dan peralatan (Firman, 2017).

Pada 2014, Presiden Joko Widodo menekankan empat kebijakan utama dalam pertahanan, termasuk peningkatan kesejahteraan dan penyediaan Alutsista. Dalam konteks ini, Indonesia membutuhkan pembaruan dan peningkatan alutsista udara untuk menjaga kedaulatan wilayahnya. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada pembelian jet tempur Rafale dari Prancis sebagai langkah strategis untuk memperkuat pertahanan udara Indonesia dan memastikan kesiapan militernya menghadapi berbagai ancaman (BBC, 2022).

Perkembangan Kerjasama Pertahanan Indonesia dan Perancis

Kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Prancis telah mengalami perkembangan signifikan sejak dimulainya pada tahun 1996 dengan penandatanganan MoU kerjasama pertahanan. Beberapa peristiwa penting dalam hubungan ini termasuk pembelian 32 unit panzer VAB pada tahun 2006 dan pertukaran pelatihan militer antara kedua negara.

1. *Indonesia-France Defence Dialogue (IFDD)*

Salah satu forum utama untuk dialog pertahanan bilateral adalah Indonesia-France Defence Dialogue (IFDD), yang dilaksanakan setiap tahun sejak tahun 2013. IFDD ini mencakup beberapa subkomite, termasuk subkomite Strategi, Operasi/Asosiasi Militer, Industri Pertahanan, dan Pembelian. Tujuannya adalah untuk mengkaji kerjasama yang sudah ada dan merencanakan langkah-langkah untuk memperdalam kerjasama di masa depan (DPR RI, 2011).

2. *Defence Industry & Procurement Sub-committee*

Subkomite Industri Pertahanan dan Pembelian memainkan peran penting dalam memfasilitasi kerjasama antara perusahaan pertahanan Indonesia dan Prancis. Contohnya adalah kolaborasi antara PT. Dirgantara Indonesia dengan Airbus Helicopters untuk helikopter TNI dan kerjasama antara PT. Pindad dan MBDA dalam pengembangan sistem pertahanan udara. Pada tahun 2017, Presiden Prancis François Hollande mengunjungi Indonesia, dan sejumlah perjanjian kerjasama ditandatangani, termasuk Letter of Intent (LoI) antara Menteri Pertahanan kedua negara. Perjanjian ini membuka jalan bagi kerjasama yang lebih erat dalam berbagai bidang, seperti operasional kapal selam, pesawat tempur, dan alutsista lainnya (Kemhan RI).

3. *Defence Cooperation Agreement (DCA)*

Pada tahun 2020, di bawah kepemimpinan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Indonesia dan Prancis menandatangani *Defence Cooperation Agreement* (DCA), yang memperluas cakupan kerjasama pertahanan, termasuk pendidikan militer, pengembangan teknologi pertahanan, dan produksi bersama. DCA ini bertujuan untuk memanfaatkan potensi dan keunggulan masing-masing negara dalam memperkuat industri pertahanan dan kemampuan strategis mereka (Christy, 2024). Kerjasama ini menunjukkan komitmen kedua negara untuk terus memperkuat hubungan pertahanan mereka dan memajukan kepentingan keamanan bersama.

Dassault Aviation

Dassault Aviation (1916) adalah perusahaan dirgantara Prancis yang didirikan oleh Marcel Ferdinand Bloch, yang kemudian dikenal sebagai Marcel Dassault. Perusahaan ini memiliki sejarah panjang dalam pembuatan berbagai jenis pesawat, termasuk pesawat militer, pesawat regional, pesawat bisnis, dan jet tempur. Marcel Dassault memulai kariernya di industri dirgantara dengan menciptakan baling-baling pesawat yang disebut Eclair Propeller pada tahun 1916. Karya ini mendapat pengakuan luas dan menjadikannya seorang legenda di dunia penerbangan pada masanya. Setelah Perang Dunia II, Dassault Aviation terus berkembang dan memperkuat posisinya sebagai penyedia utama pesawat bagi Angkatan Udara Prancis.

Pada tahun 1967, perusahaan ini mengakuisisi Breguet Aviation, yang memperluas kemampuan dan portofolio produk mereka. Selama lebih dari seratus tahun, Dassault Aviation telah memproduksi lebih dari 10.000 pesawat yang telah dikirim ke sekitar 90 negara di seluruh dunia. Beberapa contoh pesawat tempur terkenal yang diproduksi oleh Dassault Aviation adalah Jaguar, Mirage, dan Rafale. Pesawat-pesawat ini terkenal di seluruh dunia karena teknologi canggih dan keandalan mereka, serta digunakan oleh berbagai angkatan udara di banyak negara. Dengan perkembangan teknologi dan inovasi, Dassault Aviation terus memperluas jangkauan produknya dan memainkan peran penting dalam industri dirgantara global (Dassault Aviation, 2024).

Peran Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dalam Kerjasama Pertahanan Indonesia dan Prancis

Setiap kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Prancis dilakukan dengan persetujuan dan pengawasan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia sesuai Undang-Undang No. 3 Tahun 2002. Menteri Pertahanan bertanggung jawab sebagai pembantu Presiden dalam Pertahanan Negara dan untuk membina industri pertahanan. Kementerian memiliki Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan dan Subdit Perizinan untuk evaluasi industri pertahanan. Ada juga Subdit Teknologi dan Industri Pertahanan untuk menilai industri dalam desain alutsista dengan teknologi tinggi. Sub-Direktorat Imbal Dagang, Kandungan Lokal dan Offset bertugas merumuskan peraturan dan memonitor implementasinya. Kementerian berupaya mencegah imbal dagang dan mengkoordinasikan dengan industri pertahanan dalam pengadaan alutsista. Kerjasama

antara Indonesia dan Prancis dalam pengadaan jet tempur Rafale merupakan contoh kolaborasi strategis yang telah berlangsung lama dengan perkembangan positif hingga kontrak pengadaan jets ditandatangani pada tahun 2022 (Santiko, 2022).

Kebijakan Pertahanan Indonesia dan Tahap Pengadaan Alutsista

Kebijakan pertahanan Indonesia berubah dengan setiap pergantian presiden. Dalam era Susilo Bambang Yudhoyono, fokusnya adalah memperkuat hubungan nasional dan internasional. Di bawah Joko Widodo, kebijakan pertahanan berfokus pada pemenuhan MEF, dengan persentase mencapai 63,3. Pengadaan alutsista dari dalam dan luar negeri harus melalui proses perencanaan dan perawatan. Presiden juga mendorong kemandirian industri pertahanan nasional dengan transformasi belanja menjadi investasi pertahanan. Pembelian alutsista asing harus menyertakan imbal dagang, kandungan lokal, offser, dan transfer teknologi. Perlu adanya Renstra jangka panjang untuk industri pertahanan menjadi mandiri. Dalam menentukan kebijakan pertahanan, ada dua aktor penting yang berpengaruh (Rizal, 2022).

Faktor Pendorong

Faktor-faktor yang mendorong kerja sama antara Indonesia dan Prancis, terutama dalam konteks pengadaan jet tempur Rafale. Faktor-faktor ini dikategorikan menjadi faktor internal dan eksternal.

1. Faktor Internal

a. Kapasitas Industri Pertahanan Indonesia:

Didorong oleh kebutuhan untuk memperkuat pertahanan, Indonesia memutuskan untuk membeli alutsista dari luar negeri karena kapasitas industri pertahanan dalam negeri yang masih terbatas. Melalui kerja sama dengan negara lain, Indonesia diharapkan dapat menerima transfer teknologi, yang juga akan meningkatkan kemampuan industri dalam negeri di masa depan.

b. Gaya Kepemimpinan Presiden Joko Widodo:

Gaya kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang cenderung mengutamakan musyawarah dan mencari jalan aman memengaruhi kebijakan pertahanan. Di bawah kepemimpinannya, Indonesia berfokus pada pembaharuan alutsista sebagai respons terhadap ancaman militer.

c. Gaya Kepemimpinan Menhan Prabowo Subianto:

Prabowo Subianto, dengan latar belakang militer yang kuat, telah berperan aktif dalam memperkuat hubungan pertahanan Indonesia dengan negara lain, termasuk Prancis. Di bawah kepemimpinannya, Indonesia berhasil mencapai kesepakatan DCA dengan Prancis yang memungkinkan pembelian jet tempur Rafale.

2. Faktor Eksternal

a. Status Indonesia Sebagai Negara Terkuat di ASEAN:

Sebagai negara terkuat di ASEAN, Indonesia memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga stabilitas kawasan, yang mendorong kebutuhan untuk memperkuat pertahanan melalui pengadaan alutsista modern seperti Rafale.

b. Status Indonesia sebagai Anggota G20:

Sebagai anggota G20, Indonesia memiliki kredibilitas di dunia internasional, yang memengaruhi pilihannya untuk bekerja sama dengan negara-negara yang memiliki status serupa, seperti Prancis, dalam pengadaan alutsista.

c. Prancis Sebagai Mitra Strategis:

Hubungan historis yang kuat dan posisi Prancis sebagai salah satu negara dengan industri pertahanan terbesar di dunia menjadikannya mitra strategis bagi Indonesia. Kerja sama ini dipandang sebagai langkah yang aman dan tepat waktu dalam konteks geopolitik saat ini.

Secara keseluruhan, keputusan Indonesia untuk bekerja sama dengan Prancis dalam pengadaan jet tempur Rafale didasarkan pada berbagai pertimbangan strategis, baik dari sisi internal maupun eksternal, yang mencerminkan penilaian rasional dan kepentingan nasional.

Penentuan Pemilihan Rafale

Upaya Indonesia dalam memperkuat pertahanan nasional melalui kerja sama dengan Prancis, khususnya dalam pengadaan jet tempur Dassault Rafale dan pengembangan industri pertahanan dalam negeri. Berikut adalah poin-poin penting yang diuraikan:

1. Pengadaan Jet Tempur Rafale

a. Pembelian Tahap Pertama: Indonesia memutuskan untuk membeli enam unit jet tempur Rafale generasi 4.5 dari Prancis sebagai bagian dari upaya modernisasi alutsista (alat utama sistem senjata) TNI.

- b. Rencana Pembelian Tambahan: Kesepakatan ini akan diikuti oleh pembelian tambahan sebanyak 36 unit Rafale, sehingga totalnya menjadi 42 unit. Pembelian ini termasuk dukungan latihan, persenjataan, dan simulator yang diperlukan untuk pengoperasian Rafale.
 - c. Nilai Kontrak: Total nilai kontrak dengan Prancis mencapai US\$ 8.1 miliar (sekitar Rp. 116.2 triliun), yang mencakup berbagai aspek termasuk program offset dan transfer teknologi (ToT) yang melibatkan kerja sama antara Dassault dan PT. Dirgantara Indonesia (PT. DI).
2. Investasi Jangka Panjang
- a. Tantangan Baru: Kedatangan Rafale membawa tantangan baru bagi TNI, terutama karena perbedaan sistem yang digunakan pada pesawat buatan Prancis dibandingkan dengan pesawat buatan Rusia atau Amerika yang sudah dimiliki TNI. Hal ini memerlukan kalibrasi peralatan elektronik yang canggih serta pembangunan infrastruktur yang mendukung.
 - b. Pentingnya Transfer Teknologi (ToT): Sebagai bagian dari implementasi UU No. 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan, ToT menjadi cara penting untuk mewujudkan visi Presiden dalam mengubah belanja sektor pertahanan menjadi investasi jangka panjang. Melalui ToT, Indonesia dapat meningkatkan pemahaman dan kemampuan manufaktur dalam industri aviasi.
 - c. Kontroversi Harga dan Kesesuaian: Meski ada pro dan kontra terkait harga Rafale yang dianggap mahal dan kesesuaianya dengan karakter geografis Indonesia, pesawat ini tetap dinilai sebagai investasi jangka panjang yang berharga jika dimanfaatkan sesuai fungsinya dan didukung dengan infrastruktur yang memadai.
3. Pengembangan Kerjasama Pertahanan
- a. Strategi Kerjasama**: Kemhan bersama Prancis mengembangkan strategi yang mencakup tiga komponen utama: perangkat lunak, perangkat keras, dan sumber daya manusia. Ini melibatkan penandatanganan beberapa MoU antara BUMNIS di bidang pertahanan dengan mitra Prancis.
 - b. Penerapan dan Operasional: Pembelian Rafale juga akan berdampak pada pengembangan infrastruktur pendukung, seperti peralatan pendukung darat, laboratorium kalibrasi, dan pengembangan taktik khusus untuk pengoperasian Rafale.

- c. Pentingnya Pengembangan SDM: Untuk mendukung operasional Rafale, diperlukan pengembangan sumber daya manusia melalui program pelatihan dan pendidikan personel TNI. Ini merupakan bagian dari mekanisme offset yang disepakati dengan Prancis.
- d. Peluang Pengembangan Teknologi: Kerja sama strategis ini diharapkan dapat membuka peluang bagi Indonesia untuk mengembangkan sistem rudal dan radar anti udara secara mandiri di masa depan.

Kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Prancis, terutama dalam pengadaan Rafale, bukan hanya bertujuan untuk memperkuat kekuatan militer Indonesia, tetapi juga sebagai langkah strategis untuk membangun industri pertahanan dalam negeri melalui investasi jangka panjang dan transfer teknologi. Meskipun ada tantangan dan kontroversi terkait dengan pembelian ini, kerjasama ini diharapkan memberikan dampak positif bagi pertahanan dan pengembangan teknologi Indonesia di masa mendatang.

KESIMPULAN

Keputusan Indonesia untuk membeli jet tempur Rafale dari Prancis adalah langkah strategis yang mempertimbangkan berbagai faktor baik internal maupun eksternal. Pilihan ini bukan hanya sekadar pembelian alat utama sistem senjata (alutsista) untuk memperkuat pertahanan negara, tetapi juga bagian dari strategi yang lebih luas untuk meningkatkan kapabilitas militer dan posisi tawar Indonesia di kawasan Asia Tenggara dan global.

Faktor internal yang mendorong keputusan ini termasuk kondisi industri pertahanan dalam negeri yang masih berkembang dan belum mampu memenuhi kebutuhan teknologi militer secara mandiri. Oleh karena itu, kerja sama dengan negara lain, seperti Prancis, menjadi solusi jangka pendek yang efektif. Selain itu, pemangku kebijakan seperti Presiden dan Menteri Pertahanan juga memainkan peran penting dalam proses pengambilan keputusan, dengan mempertimbangkan kepentingan nasional dan pertahanan jangka panjang.

Dari sisi eksternal, posisi strategis Indonesia di kawasan Asia Tenggara dan dinamika geopolitik regional memerlukan penguatan alutsista untuk menjaga stabilitas dan keamanan nasional. Jet tempur Rafale, dengan spesifikasi dan teknologi yang

canggih, dianggap mampu memenuhi kebutuhan pertahanan Indonesia dan memberikan keuntungan yang lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan.

Secara keseluruhan, pembelian Rafale dari Prancis merupakan investasi jangka panjang yang tidak hanya meningkatkan alutsista negara tetapi juga memperkuat posisi Indonesia di kancah politik regional dan global. Keputusan ini diambil setelah melalui pertimbangan dan penelitian yang mendalam, menunjukkan bahwa Indonesia berusaha memenuhi kepentingan nasionalnya melalui kebijakan yang rasional dan strategis.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Disertasi

- Robert Jackson dan George Sorensen, "Pengantar Studi Hubungan Internasional, vol.5", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014) 137.
- Daniel S.papp, Contemporary International Relations :Framework For Understanding, (US Macmillan college,1994). hlm 46
- Makmur Supriyanto, Tentang Ilmu Pertahanan, (Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), hlm. 139.
- Aleksius Jemad, Politik Global Dalam Teori dan Praktik (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008) 61
- Umar Suryadi Bakry, Metode Penelitian Hubungan Internasional, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2016) hal 62

Artikel/Berita

- CNN Indonesia. "Presiden Jokowi Beberkan Empat Kebijakan Pertahanan Prioritas" diakses dari: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20141230114031-32-21287/presiden-jokowi-beberkan-empat-kebijakan-pertahanan-prioritas> pada 2 Oktober 2023.
- Kemhan RI, "Menhan Prabowo Tandatangani Perjanjian Kerja Sama Pertahanan RI – Perancis", diakses dari <https://www.kemhan.go.id/2021/06/28/menhan-prabowo-tandatangani-perjanjian-kerja-sama-pertahanan-ri-perancis.html> pada 2 Oktober 2023.
- Kemhan RI, "RI – Perancis Bahas Isu Regional dan Indo-Pacific", diakses dari <https://www.kemhan.go.id/2019/07/09/ri-perancis-bahas-isu-regional-dan-indo-pacific.html> pada 2 Oktober 2023.
- Kementerian Luar Negeri Indorfh. "Hubungan Bilateral Prancis-Indonesia" (Internet) diakses pada 24 Juni pukul 15.35 melalui <https://lu.go.id/pages/prancis-indonesia/624/etc-menu>
- BBC Indonesia. "Jet tempur Rafale buatan Prancis dan rencana Indonesia untuk perkuat alutsista, apa istimewanya?" (Internet, 2022) diakses pada 24 Juni 2022 pukul 20.20 melalui <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-60343367>

Natasia Christy. “DCA Indonesia-Prancis, Jalin Kerja Sama dari Pelatihan Militer Hingga Penanganan Covid-19” (Internet) diakses pada 1 Februari 2024 pada 11.02 melalui <https://www.beritasatu.com/archive/793861/dca-indonesiaprancis-jalin-kerja-sama-dari-pelatihan-militer-hingga-penanganan-covid-19>

Dassault Aviation. “1916 To This Day”. (Internet) diakses pada 2 Februari 2024 pukul 18.54 melalui <https://www.dassault-aviation.com/en/passion/history/1916-to-this-day>

Dassault Aviation. “Company Profile”. (Internet) diakses pada 5 Februari 2024 pukul 18.10 melalui <https://www.dassault-aviation.com/en/group/about-us/company-profile/>

BBC News. “Jet tempur Rafale buatan Prancis dan rencana Indonesia untuk perkuat alutsista, apa istimewanya? ”. (Internet, 2022) diakses pada 09 Agustus 2022 pukul 21.50 melalui <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-60343367>